

THE ROLE OF CIVIL SOCIETY: STUDI NARATIF PERANAN LSM PUSAT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA WANITA (PPSW) JAKARTA DALAM PEMBERDAYAAN WANITA

Yunita Anggraeni¹, Hanny Purnamasari², Mochamad Faizal Rizki³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Singaperbangsa Karawang
email: 2010631180117@student.unsika.ac.id¹, hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id²,
mochamad.faizal@fisip.unsika.ac.id³

Abstrak

Pada penelitian ini membahas mengenai peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pemberdayaan Wanita. LSM yang menjadi tempat penelitian kali ini adalah LSM Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Jakarta. Peranan LSM dalam pemberdayaan wanita sangat diperlukan mengingat Indonesia sebagai negara berkembang secara terus menerus melakukan Pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Peran aktor non-pemerintah sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). LSM perlu memainkan peran yang luar biasa agar dapat menjalankan struktur sosial masyarakat secara keseluruhan. Fungsi LSM yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat akan berpengaruh pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian ini digunakan teori tahapan pemberdayaan oleh Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho yang memuat indikator 1). Tahap penyadaran 2). Tahap Pelatihan 3). Tahap Pendampingan. Studi naratif menjadi desain penelitian kali ini. Dimana hasil penelitian akan memuat pengalaman-pengalaman partisipan dalam melakukan pemberdayaan terhadap wanita. Sumber data yang dikumpulkan didapat terbagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

Kata kunci: LSM, Wanita, Pemberdayaan

Abstract

This research discusses the role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in empowering women. The NGO that is the place of research this time is the Jakarta Women's Resource Development Center (PPSW) NGO. The role of NGOs in empowering women is very necessary considering that Indonesia, as a developing country, is continuously carrying out development to improve the welfare of its people. The role of non-government actors is very important in realizing good governance. NGOs need to play an extraordinary role in order to run the social structure of society as a whole. The function of NGOs related to community empowerment will influence the achievement of community welfare. In this research, the empowerment stage theory by Randy R Wrihatnolo and Riant Nugroho was used which contains indicator 1). Awareness stage 2). Training Phase 3). Mentoring Stage. Narrative study is the research design this time. Where the research results will contain participants' experiences in empowering women. The sources of data collected were divided into two, namely primary data sources and secondary data sources.

Keywords: NGOs, Women, Empowerment

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus melakukan pembangunan secara bertahap dan terus-menerus guna meningkatkan taraf hidup masyarakatnya tak terkecuali kaum wanita. Pada dasarnya peran wanita dalam pembangunan merupakan hal yang penting karena keterlibatan wanita dalam proses pembangunan adalah salah satu bagian yang tak dapat dipisahkan terlebih dalam lingkungan sosial masyarakat. Pada dasarnya kaum wanita juga memiliki kapasitas yang setara dengan kaum laki-laki dalam berkontribusi melaksanakan pembangunan masyarakat. (Wula & Anggraini, 2022)

Partisipasi wanita merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan. Upaya pengembangan usaha mikro yang dilakukan oleh wanita ini menjadi penting, karena wanita berhadapan dengan kendala-kendala tertentu yang dikenal dengan istilah “triple burden of women”, yaitu ketika mereka ‘diminta’ menjalankan fungsi reproduksi, produksi, sekaligus fungsi sosial di masyarakat pada saat yang bersamaan. (Hidayati, 2023)

Kebanyakan wanita tetap bekerja di sektor informal atau pekerjaan yang tidak memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus. Pekerjaan-pekerjaan ini biasanya kurang memiliki perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan yang memadai, disamping kondisi kerja yang memprihatinkan serta pendapatan yang rendah. Beberapa studi mengindikasikan upah wanita lebih rendah dari laki-laki. Salah satu studi menunjukkan bahwa upah wanita sekitar 70% dari upah laki-laki. Dilihat dari akses terhadap kredit, pengusaha wanita diperkirakan mempunyai akses yang lebih kecil, 11% dibandingkan laki-laki, 14%. (Kaslam, 2023)

Budaya yang cenderung patriarki mengakibatkan wanita sebagai salah satu kelompok yang terpinggirkan, baik dalam akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Maka dari itu untuk membangun pemahaman dan meningkatkan profesionalitas daya saing antara laki-laki dan Wanita dibutuhkannya program pemberdayaan wanita guna meningkatkan kesejahteraan wanita (Kaslam, 2023).

Peran aktor non-pemerintah sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Dalam mewujudkan konsep good governance, Civil Society mempunyai peran yang besar sebagai bagian dari masyarakat untuk melakukan pemberdayaan dan membantu peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Civil Society mencakup berbagai organisasi formal dan informal, termasuk: budaya, informasi dan pendidikan, ekonomi, berorientasi pada isu, pembangunan, kepentingan, dan kewarganegaraan. Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berbasis komunitas dan profesional seperti kelompok kritis independen, dunia usaha maupun media merupakan bagian dari civil society. (Syarifah, 2019) Berdasarkan hal tersebut maka dalam kondisi semacam ini seharusnya LSM dapat mengambil peran untuk memperbaiki kondisi yang ada, dalam rangka menciptakan civil society yang kuat dan mandiri.

Menurut Hikam, kemampuan LSM adalah untuk memperkuat masyarakat bawah melalui sebuah kegiatan pembinaan, pendampingan, dukungan, pembelaan, serta menyebarluaskan pelaksanaan program kepada masyarakat agar terpenuhinya hak-hak dasar bernegara (Hikam, 2015). LSM memiliki peran penting di dalam struktur sosial, sehingga LSM perlu memainkan peran yang luar biasa agar dapat menjalankan struktur sosial masyarakat secara keseluruhan. Fungsi LSM yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat akan berpengaruh pada pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Jakarta merupakan salah satu LSM yang bergerak dalam bidang pemberdayaan Wanita yang berkedudukan di Jakarta. Dilansir dari website PPSW Jakarta, Saat ini PPSW Jakarta merupakan sebuah lembaga otonom yang termasuk dalam Asosiasi PPSW. PPSW Jakarta mempunyai wilayah kerja yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Bekasi, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. PPSW Jakarta mempunyai beberapa program kerja yang terkait dengan pemberdayaan Wanita meliputi: pemberdayaan ekonomi Wanita, Kesehatan Wanita, pemberdayaan politik dan peningkatan partisipasi wanita.

Menurut Budi Setyono, LSM merupakan lembaga atau organisasi non-partisan yang berbasis pada gerakan moral yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. LSM dipandang mempunyai peran penting dalam proses demokratisasi. Organisasi jenis ini diyakini mempunyai fungsi dan ciri khusus serta berbeda dengan organisasi pada sektor pemerintahan, dan swasta, sehingga mampu melaksanakan tugas tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi di kedua sektor tersebut (Nurmalasari, Hambali, & Zahirman, 2016).

Dalam konteks hubungan yang bersifat collaboration/cooperation, pemerintah menganggap bahwa bekerja sama dengan kalangan LSM merupakan sesuatu yang menguntungkan. LSM dan pemerintah berdiri pada posisi yang equal dan sejajar. Hubungan ini umumnya dilaksanakan oleh LSM-LSM dengan ruang lingkup kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat. Wujud kerjasama antara LSM dan pemerintah antara lain dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, seminar dan kegiatan lain yang sifatnya meningkatkan kapasitas masyarakat. Berdasarkan hal ini, dengan menggunakan teori tahapan pemberdayaan dari Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho peneliti tertarik untuk membahas lebih jauh terkait bagaimana peranan yang dilakukan LSM PPSW Jakarta dalam melakukan pemberdayaan bagi kaum Wanita.

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif studi naratif untuk menangkap cerita detail mengenai urutan pengalaman-pengalaman partisipan seputar topik penelitian mengenai peranan yang dilakukan

LSM PPSW Jakarta berupa pemberdayaan perempuan. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, maka nantinya data primer akan didapatkan dari hasil observasi di lapangan dan wawancara yang berupa cerita mengenai pengalaman-pengalaman dari LSM PPSW Jakarta dalam melakukan perannya untuk memberdayakan Perempuan. Selain itu, data sekunder didapatkan dari berbagai sumber seperti studi kepustakaan, jurnal, dokumen, foto dan video partisipan. (Creswell, 2013)

Berdasarkan penjelasan diatas, pengumpulan data akan dilakukan dengan wawancara yang berfokus terhadap cerita pengalaman partisipan. Wawancara dilakukan kepada partisipan untuk mendorong mereka mengungkapkan secara detail mengenai pemberdayaan perempuan (Creswell, 2013). Partisipan dalam hal ini yakni, pengurus LSM PPSW Jakarta dan Masyarakat peserta program. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur untuk menjamin konsistensi pertanyaan wawancara antar partisipan penelitian. Semua rekaman audio wawancara akan ditranskrip untuk digunakan saat menganalisis keseluruhan kumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, dibahas hasil penelitian mengenai peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) dalam pemberdayaan wanita. Dalam teori Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho pada dimensi tahap penyadaran ini mengacu sejauh mana wanita merasa membutuhkan peningkatkan kapasitas diri mereka. Tahap penyadaran memuat beberapa indikator, diantaranya (1) Cara yang dilakukan PPSW Jakarta dalam menyadarkan Wanita tentang pentingnya peningkatan kapasitas diri, (2) Tantangan yang dihadapi dalam tahap penyadaran, dan (3) Mengukur keberhasilan dalam tahap penyadaran.

1. Tahap Penyadaran

PPSW Jakarta dalam tahap penyadaran sudah melakukan beberapa hal untuk menyadarkan wanita tentang pentingnya peningkatan kapasitas diri bagi kaum wanita. Hal tersebut dilihat dari upaya pengurus PPSW Jakarta yang menemui langsung wanita-wanita dari rumah ke rumah melakukan perkenalan dan sosialisasi dan setelah wanita-wanita tersebut sadar maka dibentuklah kelompok koperasi yang mewadahi wanita-wanita ini untuk berkembang.

Tantangan yang dihadapi oleh pihak PPSW Jakarta lebih kepada tantangan internal dari wanita tersebut. Seperti yang dijelaskan diatas, wanita cenderung menganggap bahwa dirinya tidak patut diprioritaskan dan tidak perlu mendapat pemberdayaan. Maka pada awal-awal kedatangan PPSW Jakarta ke wilayah yang ingin diberdayakan tidak langsung disambut dengan baik. Seperti di Kawasan pecinan yang lebih dikenal China Benteng di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, pada saat awal kedatangan pengurus PPSW Jakarta yang dimana mereka mengenakan kerudung langsung mendapat penolakan dari wanita-wanita di wilayah tersebut. Dengan adanya perbedaan ras, suku, budaya, agama menjadikan mereka membatasi diri dengan komunitas yang berbeda. Namun tentu PPSW Jakarta tidak menyerah begitu saja untuk mendekati mereka. PPSW Jakarta menilai bahwa penolakan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah faktor adat dan kebiasaan. Hal tersebut terlihat dari kebiasaan berjudi ibu-ibu di Kawasan pecinan ini. Faktor budaya juga memengaruhi penolakan dari ibu-ibu terhadap kegiatan PPSW di Kawasan ini. Karena para penggerak pemberdayaan Masyarakat PPSW memakai jilbab yang berbeda keyakinan dengan mayoritas warga di Kawasan ini. Faktor lain yang menjadi penghambat adalah pengetahuan warga yang melakukan penolakan. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh Tingkat Pendidikan dan keterbatasan ekonomi serta akses informasi. Tantangan lainnya juga muncul dari lingkungan wanita tersebut. Tidak jarang suami-suami mereka tidak mendukung mereka untuk ikut mendapatkan pemberdayaan.

2. Tahap Pelatihan

Pada dasarnya pelatihan dalam pemberdayaan diberikan agar seseorang memperoleh pengetahuan dan keterampilan sehingga ada hasil yang diperoleh dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya tidak mampu menjadi mampu, dari yang tadinya tidak mau menjadi mau.

PPSW Jakarta pada dasarnya telah merancang program-program pelatihan kedalam bentuk modul-modul secara terstruktur, mulai dari pelatihan awal pada saat memulai kaderisasi hingga pelatihan lanjutan. Berdasarkan wawancara dengan pengurus PPSW Jakarta, Iqbal menjelaskan bahwa PPSW Jakarta akan melihat terlebih dahulu tentang bagaimana keadaan lingkungan di wilayah tersebut dan apa yang sekiranya dibutuhkan atau ada permasalahan apa di lingkungan tersebut kemudian pelatihan apa yang cocok untuk wanita-wanita di wilayah tersebut. PPSW Jakarta menyadari bahwa setiap kebutuhan atau isu-isu di tiap wilayah tentu akan berbeda. Selain pelatihan untuk peningkatan

kapasitas diri dan pengelolaan koperasi, PPSW Jakarta juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggotanya yang memiliki usaha. Pelatihannya meliputi business plan, manajemen usaha kecil, pemasaran digital.

Seiring berjalannya pelatihan yang dilakukan, PPSW Jakarta akan melihat dan memantau perkembangan serta kebutuhan dari wanita-wanita. PPSW Jakarta terus menggali hal-hal yang mengenai peningkatan kapasitas diri dan pengelolaan koperasi. PPSW Jakarta juga berusaha mencari tahu potensi yang bisa dikembangkan di daerah tersebut. Seperti halnya di Kawasan pemukiman china benteng mereka punya kerajinan batik dan pengembangan usaha kue keranjang untuk perayaan imlek yang terus didampingi oleh PPSW Jakarta terkait perkembangannya. Ada banyak kisah-kisah menarik mengenai perkembangan wanita-wanita dilingkup PPSW Jakarta ini. Seperti hasil wawancara penulis dengan Tyas, beliau menceritakan bahwa ada juga wanita yang meningkat percaya dirinya kemudian menjadi ketua RT/RW diwilayah tempat tinggalnya. Selain memberi pelatihan tentang pengembangan usaha, PPSW juga mendampingi bisnis usaha mereka untuk memperoleh label halal dan P IRT sehingga pesanan yang datang dari pelanggan menjadi lebih rutin.

3. Tahap Pendampingan

Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho mengemukakan dalam tahap pendampingan ini merupakan upaya mendengarkan keluh kesah masyarakat, apa saja yang dihadapi setelah pelatihan selesai dilakukan untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik.

Pendampingan yang dilakukan PPSW Jakarta sifatnya menyeluruh, artinya pendampingan tidak hanya dalam lingkup pengelolaan koperasi namun juga fokus ke anggota. Hal ini diperkuat oleh tanggapan salah satu peserta yang diwawancarai. Ranti menyebutkan bahwa PPSW Jakarta turun langsung membantu ketika muncul masalah didalam koperasi maupun masalah yang anggota alami.

Adapun tahapan pendampingan yang dilakukan oleh PPSW Jakarta pada mulanya dilakukan secara intensif setiap minggu. Namun ketika wanita-wanita itu sudah mulai mendapat pemahaman mengenai alur koperasi maka frekuensi pendampingan dilakukan satu bulan sekali. Pendampingan yang dilakukan setiap bulan yakni rapat rutin dan membahas seputar apa saja yang sudah dilakukan dalam pengelolaan koperasi serta hal apa saja yang terjadi di koperasi tersebut.

Dalam strategi wanita usaha mikro, pihak PPSW Jakarta menjelaskan bahwa wanita-wanita ini akan diberikan pelatihan mengenai business plan, setelah mendapatkan pelatihan selanjutnya wanita ini membuat rencana bisnisnya yang mana akan didampingi dan dipantau oleh PPSW Jakarta. Apabila ada kendala dalam menjalankan rencana bisnis maka PPSW Jakarta akan membantu dan menemukan solusinya.

SIMPULAN

PPSW Jakarta melakukan beberapa upaya awal untuk menyadarkan para Wanita tentang peningkatan kapasitas diri mereka seperti melakukan pendekatan secara personal dengan berkenalan langsung kemudian membentuk suatu kelompok dan memberikan penyadaran gender dan peningkatan kapasitas berupa pelatihan-pelatihan. PPSW Jakarta mempunyai program-program pelatihan yang dimasukan kedalam bentuk modul-modul secara terstruktur, mulai dari pelatihan awal pada saat memulai kaderisasi hingga pelatihan lanjutan. PPSW Jakarta akan melihat terlebih dahulu tentang bagaimana keadaan lingkungan di wilayah tersebut dan apa yang dibutuhkan dan permasalahan apa yang ada dilingkungan tersebut kemudian melihat pelatihan apa yang cocok untuk wanita-wanita di wilayah tersebut. PPSW Jakarta melakukan pendampingan secara menyeluruh baik dalam lingkup koperasi dan juga fokus ke anggota. Pendampingan pada mulanya dilakukan secara intensif setiap minggu. Namun ketika wanita-wanita itu sudah mulai mendapat pemahaman mengenai alur koperasi maka frekuensi pendampingan dilakukan satu bulan sekali. PPSW Jakarta mendampingi Wanita-wanita dengan mengadakan rapat rutin setiap bulan untuk membahas seputar apa saja yang sudah dilakukan dalam pengelolaan koperasi serta hal apa saja yang terjadi di koperasi tersebut.

SARAN

Pertama dalam melakukan penyadaran PPSW Jakarta dapat meningkatkan kapabilitas berkomunikasi dengan wanita-wanita yang memiliki adat, kebiasaan, budaya yang berbeda sehingga diharapkan proses penyadaran tentang pentingnya pemberdayaan bagi perempuan dapat lebih efektif. Kedua dalam pelatihan yang dilakukan PPSW Jakarta dapat mengeksplorasi dan menambahkan materi pelatihan baru serta menambah frekuensi pelatihan sehingga diharapkan Wanita-wanita yang terlibat

dalam pengurusan koperasi dapat menambah ilmu serta skill mereka. Ketiga dalam proses pendampingan yang dilakukan, PPSW Jakarta dapat melakukan penambahan sumber daya manusia terutama untuk koperasi-koperasi. Penambahan sumber daya manusia juga diharapkan lebih menunjang proses pendampingan kepada Wanita-wanita terutama mereka yang memiliki usaha mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design : choosing among . california*: Vicki Knight.
- Hidayati, D. (2023). *MODEL PEMBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN PEREMPUAN MELALUI KELOMPOK WANITA TANI DI DESA LENDANG NANGKA KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR*.
- Kaslam, N. K. (2023). *Non-Governmental Organization, Women Empowerment dan Sociopreneur Masyarakat Indonesia: Studi Kasus Pemberdayaan Perempuan di Yayasan Econatural Society*. Ruang Komunitas: Jurnal Pengabdian Masyarakat.
- Hikam, A. M. (2015). *Demokrasi dan Civil Society* (A. Mun'im DZ, Ed.; Edisi Ebook). LP3ES.
- Nurmalasari, V., Hambali, & Zahirman (2016). *PERSEPSI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN, PENERTIBAN DAN PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU*.
- Syarifah, L. (2019). *PERAN LEMBAGA KAJIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NAHDLATUL ULAMA DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN ANAK-ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA TASIKMALAYA*.
- Wula, H. V. M., & Anggraini, T. (2022). Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 5(2), 201–208. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i2.4309>